

## II . TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Teoritis

#### 1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank Indonesia dalam mewujudkan stabilitas ekonomi makro terdiri dari kerangka strategis dan kerangka operasional. Kerangka strategis umumnya terkait dengan pencapaian tujuan akhir kebijakan moneter (stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja) serta strategi untuk mencapainya (*exchange rate targeting, monetary targeting, inflation targeting, implicit but not explicit anchor*) (Warjiyo, Perry dan Solikin, 2003). Kerangka operasional kebijakan moneter terdiri dari instrumen, sasaran-operasional, dan sasaran-antara yang digunakan untuk mencapai sasaran akhir.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan

moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan moneter mempengaruhi sektor riil yaitu konsumsi, investasi, ekspor dan impor, hingga inflasi yang merupakan sasaran akhir dari kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.

Sejak tahun 2000, Bank Indonesia menerapkan pola kebijakan moneter yang di formulasikan dalam rangka mencapai sasaran tingkat inflasi yang ditargetkan. Landasan hukum kebijakan Bank Indonesia ini adalah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diungkapkan bahwa sasaran laju inflasi merupakan sasaran akhir kebijakan moneter Indonesia. Pola kebijakan ini dikenal juga dengan nama *Inflation Targeting Framework*.

Pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan *Inflation Targeting Framework (ITF)*. Kerangka kerja ini

diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (*Base money*) sebagai sasaran kebijakan moneter.

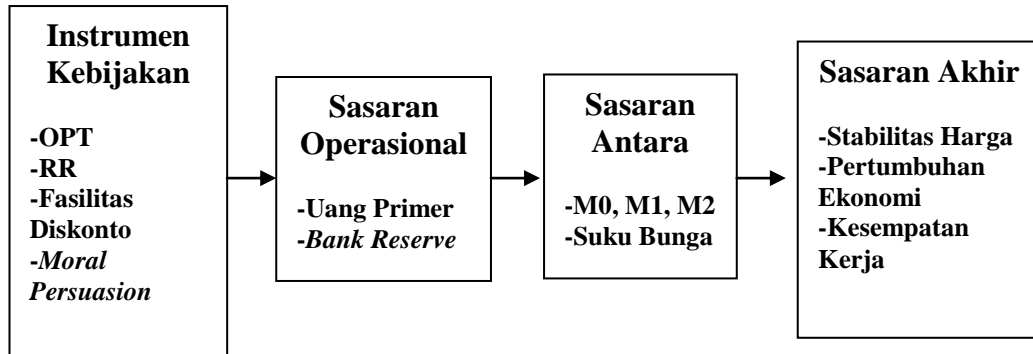
### **1.1. Kerangka Kebijakan Moneter *Monetary Base Targeting***

Sejak dilepasnya sistem *crawling band*, Bank Indonesia menargetkan *base money* (*Monetary base targeting*) dalam kerangka kebijakan moneternya periode 2000:01-2005:06. Kerangka tersebut tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia untuk menyerap kembali kelebihan likuiditas di perbankan sebagai dampak dari adanya bantuan likuiditas Bank Indonesia sebagai konsekuensi fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*.

Penggunaan sistem Penargetan besaran moneter (*Monetary base targeting*) pada dasarnya adalah penggunaan jumlah uang beredar sebagai sasaran operasional dan atau sasaran antara untuk mencapai sasaran akhir kebijakan moneter yaitu stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan jumlah uang beredar sebagai instrumen kebijakan moneter merupakan hal yang wajar pada negara-negara berkembang, bahkan saat ini China masih menerapkan jumlah uang beredar sebagai instrumen kebijakan moneternya. Alasan penggunaan jumlah uang beredar sebagai instrumen kebijakan adalah karena jumlah uang beredar berada dalam jangkauan otoritas moneter.

Sistem penargetan besaran moneter (*Monetary base targeting*) pernah diterapkan di Indonesia sebelum Juli 2005 dimana kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai target pertumbuhan jumlah uang beredar pada

tingkatan tertentu namun dalam pelaksanaannya Bank Indonesia tidak mengumumkan kepada publik berapa besar pertumbuhan jumlah uang beredar yang ingin dicapai.



Sumber : Bank Indonesia

**Gambar 4. Kerangka operasional kebijakan moneter dengan pendekatan kuantitas (Jumlah Uang Beredar).**

Dalam kerangka operasional diatas, kebijakan moneter Indonesia ditentukan oleh Jumlah Uang Beredar (JUB) secara langsung melalui pengontrolan penawaran uang dengan beberapa instrumen kebijakan, dimana Uang primer (Mo) sebagai sasaran moneter juga dengan menggunakan transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga yaitu suku bunga kredit konsumsi yang akan mempengaruhi konsumsi masyarakat dan inflasi sebagai sasaran akhir pada kebijakan moneter *Monetary base targeting*.

Studi di Bank Indonesia menyimpulkan bahwa akibat adanya perubahan struktural pasca krisis 1997, peran suku bunga menjadi semakin penting (dibandingkan dengan uang beredar) dalam mempengaruhi inflasi. Untuk itu, perlu dilakukan peninjauan ulang dan perubahan formulasi kerangka kerja kebijakan moneter (*Monetary policy framework*) Bank Indonesia yang selama ini telah dianut, dari pendekatan yang sifatnya pragmatis (*eclectic*

*approach*) ke dalam suatu *framework* baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan moneter yang sehat (*sound*).

## **1.2. Kerangka Kebijakan Moneter *Inflation Targeting***

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Pemilihan target inflasi (*Inflation targeting framework*) didasari oleh rasional bahwa inflasi yang rendah akan mendorong pencapaian stabilitas makroekonomi yang kuat.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*), setelah sebelumnya Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter.

Dalam kerangka ini kebijakan moneter dilakukan secara *forward looking*, artinya perubahan *stance* kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik.

Secara operasional, *stance* kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit

perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output pada sektor riil.

Dengan telah dilepaskannya sistem nilai tukar dengan band intervensi nilai tukar (*crawling band*) di tahun 1997, Bank Indonesia memerlukan jangkar nominal (*nominal anchor*) baru dalam rangka menjalankan kebijakan moneter. Jangkar nominal adalah variabel nominal (seperti indeks harga, nilai tukar, atau uang beredar) yang ditargetkan secara eksplisit oleh bank sentral sebagai dasar/patokan bagi pembentukan harga lainnya. Misalnya kalau nilai tukar dijadikan target, maka inflasi luar negeri akan menjadi inflasi domestik.

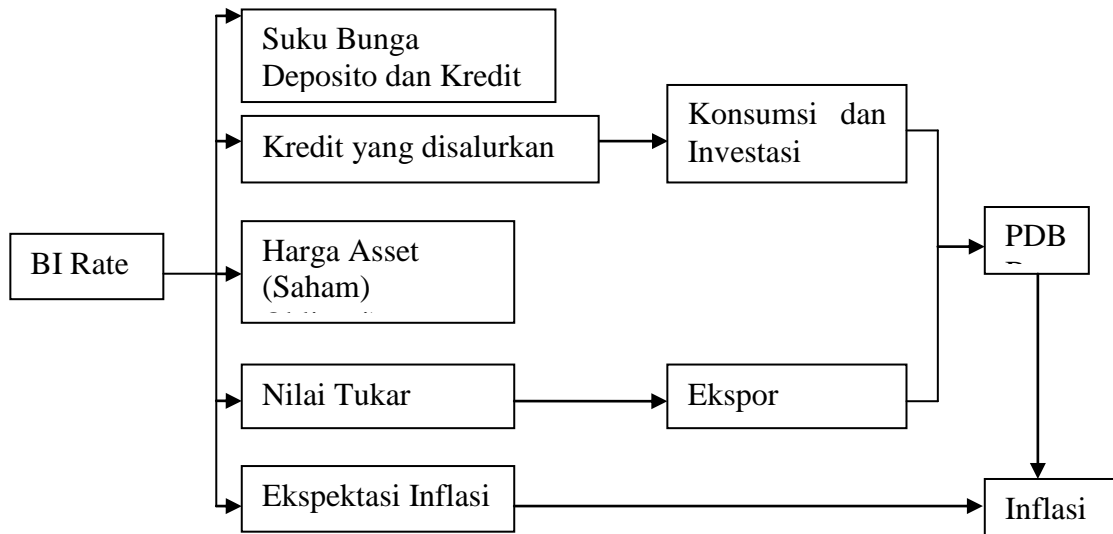
Mengapa kebijakan moneter memerlukan jangkar nominal? Karena tanpa adanya jangkar nominal, tidak ada kejelasan kemana kebijakan moneter akan diarahkan sehingga masyarakat tidak memiliki pedoman dalam membuat ekspektasi inflasi. Ibarat kapal yang mengapung di lautan tanpa kejelasan kearah mana kapal dilabuhkan. Sebaliknya, dengan adanya jangkar nominal masyarakat akan membuat ekspektasi inflasi yang diperlukan dalam kalkulasi usahanya sesuai dengan jangkar nominal tersebut. Dengan mengumumkan sasaran inflasi dan Bank Indonesia secara konsisten dapat mencapainya akan meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter yang pada gilirannya ekspektasi inflasi masyarakat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan BI (Sumber: Bank Indonesia).

### **Beberapa alasan pemilihan ITF :**

- ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan sasaran inflasi secara eksplisit masyarakat akan memahami arah inflasi. Sebaliknya dengan sasaran *base money*, apalagi jika hubungannya dengan inflasi tidak jelas, masyarakat lebih sulit mengetahui arah inflasi kedepan.
- ITF yang memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia.
- ITF bersifat *forward looking* sesuai dengan dampak kebijakan pada inflasi yang memerlukan *time lag*.
- ITF meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter mendorong kredibilitas kebijakan moneter. Aspek transparansi dan akuntabilitas serta kejelasan akan tujuan ini merupakan aspek-aspek *good governance* dari sebuah bank yang telah diberikan independensi.
- ITF tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan antara uang beredar, *output* dan inflasi. Sebaliknya, ITF merupakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan sejumlah variabel informasi tentang kondisi perekonomian.

Dalam kerangka ITF, Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan sejumlah informasi yang dapat menggambarkan kondisi inflasi ke depan. Jika proyeksi inflasi sudah tidak kompatibel dengan sasaran, Bank Indonesia melakukan respon dengan menggunakan instrumen yang dimiliki. Misalnya

jika proyeksi inflasi telah melampaui sasaran, maka Bank Indonesia akan cenderung melakukan pengetatan moneter.



Sumber : Bank Indonesia

**Gambar 5. Kerangka Operasional Kebijakan Moneter Melalui Jalur Suku Bunga**

*Stance* kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate) dan melalui transmisi jalur suku bunga, menggunakan suku bunga kredit konsumsi yang berpengaruh terhadap konsumsi dan inflasi di Indonesia.

### 1.3. Transmisi Kebijakan Moneter

Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrument moneter yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran transmisi kebijakan moneter, seperti



saluran suku bunga deposito dan kredit, kredit yang disalurkan, suku bunga, harga asset (saham), nilai tukar dan ekspektasi. Di sektor riil, kebijakan ini berpengaruh pada perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor sehingga kebijakan moneter ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan tersebut (sumber: Bank Indonesia).

## **Saluran Transmisi Kebijakan Moneter**

### **1.3.1 Suku Bunga Deposito dan Kredit**

Saluran suku bunga lebih mementingkan aspek harga di pasar keuangan terhadap aktivitas ekonomi di sektor riil. Kebijakan moneter yang diambil bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga di berbagai sektor keuangan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap output riil dan tingkat inflasi. Tahap pertama, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap suku bunga jangka pendek di pasar uang rupiah yang selanjutnya berpengaruh terhadap suku bunga deposito yang diberikan perbankan kepada simpanan masyarakat dan suku bunga kredit yang dibebankan bank kepada debiturnya. Pada tahap kedua, transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor riil akan tergantung pada pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Pengaruh suku bunga terhadap permintaan konsumsi terjadi karena bunga deposito merupakan dari pendapatan masyarakat dan bunga kredit sebagai pembiayaan konsumsi. Pengaruh diatas selanjutnya akan mempengaruhi besarnya permintaan agregat yang pada akhirnya menentukan output riil dan tingkat inflasi.

### **1.3.2. Kredit yang Disalurkan**

Dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit, pasar skredit sangatlah mempengaruhi transmisi keuangan dari sektor moneter ke sektor riil. Pasar kredit tidak selalu dalam keadaan seimbang karena adanya informasi yang tidak seimbang maupun sebab lain. Terdapat dua saluran kredit yang mempengaruhi transmisi kebijakan moneter dari keuangan ke sektor riil, yakni saluran kredit bank yang lebih mementingkan perilaku bank yang lebih selektif dalam melakukan seleksi kredit karena asymetris information atau sebab lain dan saluran neraca perusahaan yang lebih mementingkan kondisi leverage perusahaan yang berpengaruh dalam pemberian kredit. Perkembangan kredit perbankan akan berpengaruh terhadap output riil dan tingkat inflasi melalui dua hal, yaitu perkembangan investasi dan perkembangan konsumsi.

### **1.3.3. Saluran Harga Asset (Saham)**

Mekanisme transmisi melalui saluran harga asset terjadi melalui pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi bagi para investor, baik karena perubahan kekayaan yang dimiliki maupun perubahan pendapatan yang dikonsumsi yang timbul dari penanaman asset financial dan fisik tersebut. Pengaruh asset terhadap sektor riil juga terjadi permintaan investasi oleh perusahaan, ini disebabkan perubahan harga asset tersebut yang berpengaruh terhadap biaya modal yang harus dikeluarkan dalam produksi dan investasi oleh perusahaan. Kedua pengaruh harga asset tersebut selanjutnya akan berpengaruh terhadap permintaan agregat yang akan mempengaruhi output riil dan tingkat inflasi.

#### **1.3.4. Nilai Tukar**

Saluran nilai tukar lebih menekankan pada pentingnya pengaruh perubahan harga asset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Pentingnya saluran nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh asset finansial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Pengaruhnya terjadi melalui perubahan nilai tukar dan besar aliran dana yang masuk dan keluar dari suatu negara karena kegiatan perdagangan luar negeri maupun adanya modal investasi, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap output riil dan tingkat inflasi dari negara yang bersangkutan.

#### **1.3.5. Ekspektasi**

Dengan semakin meningkatnya ketidakpastian dalam ekonomi dan keuangan, saluran ekspektasi menjadi semakin penting dalam mekanisme kebijakan moneter ke sektor riil. Para pelaku ekonomi akan membentuk persepsi tertentu mengenai prospek ekonomi ke depan dalam menjalankan tindakan bisnisnya. Berkaitan dengan kebijakan moneter, yang paling diperhatikan adalah ekspektasi inflasi yang timbul di masyarakat.

Ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perkembangan inflasi yang telah terjadi dan pengaruh kebijakan moneter oleh bank sentral yang ditunjukkan dengan perkembangan suku bunga dan nilai tukar. Semakin kredibel kebijakan moneter, yang ditunjukkan dengan kemampuannya dalam mengendalikan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar, semakin kuat pula dampaknya pada ekspektasi inflasi di masyarakat. Pengaruh ekspektasi inflasi terhadap permintaan agregat terjadi karena dampaknya terhadap suku bunga riil yang

dipertimbangkan dalam menentukan besarnya permintaan konsumsi dan investasi di masyarakat. Pengaruh ekspektasi inflasi terhadap penawaran agregat terjadi melalui perubahan pola pembentukan harga produk oleh perusahaan. Pengaruh ekspektasi inflasi terhadap permintaan dan penawaran agregat tersebut akan mempengaruhi output riil dan tingkat inflasi dalam ekonomi.

#### **1.4. Tujuan Kebijakan Moneter**

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Transmisi kebijakan moneter, seperti saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga asset dan ekspektasi digunakan untuk mempengaruhi sektor riil diantaranya konsumsi sehingga kebijakan moneter ini mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi maupun inflasi yang merupakan sasaran akhir pada kebijakan moneter

## **2. Uang Primer**

Uang primer disebut juga MO yaitu Jumlah uang beredar uang kartal dan uang giral (M1) dalam transaksi berjalan. Uang primer atau uang inti atau reserve money merupakan kewajiban otoritas moneter (Bank Indonesia), yang terdiri atas uang kartal yang berada di luar Bank Indonesia dan Kas Negara, dan rekening giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) dan sektor swasta (perusahaan maupun perorangan) di Bank Indonesia (Insukindro, 1994:76). Dengan demikian, uang kartal yang dipegang pemerintah, dalam bentuk kas pemerintah atau kas Negara dan simpanan pemerintah pada Bank Indonesia tidak termasuk sebagai komponen dari uang primer.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa uang beredar dalam arti sempit (M1) adalah seluruh uang kartal dan uang giral yang ada di tangan masyarakat.

Sedangkan uang kartal milik pemerintah (Bank Indonesia) yang disimpan di bank-bank umum atau bank sentral itu sendiri, tidak dikelompokkan sebagai uang kartal. Sedangkan uang giral merupakan simpanan rekening koran (giro) masyarakat pada bank-bank umum. Simpanan ini merupakan bagian dari uang beredar, karena sewaktu-waktu dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan berbagai transaksi. Namun saldo rekening giro milik suatu bank yang terdapat pada bank sentral tidak dikatakan sebagai uang giral.

Dalam arti luas, uang beredar (M2) yaitu penjumlahan dari M1 (uang beredar dalam arti sempit) dengan uang kuasi. Uang kuasi atau *near money* adalah

simpanan masyarakat pada bank umum dalam bentuk deposito berjangka (*time deposits*) dan tabungan. Uang kuasi diklasifikasikan sebagai uang beredar, dengan alasan bahwa kedua bentuk simpanan masyarakat ini dapat dicairkan menjadi uang tunai oleh pemiliknya, untuk berbagai keperluan transaksi yang dilakukan. Dalam sistem moneter di Indonesia, uang beredar dalam arti luas ini (M2) sering disebut dengan likuiditas perekonomian.

Terdapat eksese permintaan dalam sektor barang dan jasa (pada sektor riil) karena masyarakat menilai bahwa jumlah uang yang beredar terlalu banyak apabila dibandingkan dengan kesediaan mereka untuk memiliki atau menyimpan uang tersebut maka setiap kali menerima uang, mereka akan segera membelanjakannya (Khalwaty, 2000). Berdasarkan dengan hipotesa Keynes, yakni, penawaran uang (*Money Supply*) memiliki pengaruh positif terhadap output. Apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar, Bank Indonesia akan mengambil kebijakan (menurunkan) tingkat suku bunga. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi, yang pada akhirnya akan menciptakan kenaikan *output*.

Menurut kaum monetaris, inflasi disebabkan oleh pertumbuhan penawaran uang yang tinggi, oleh sebab itu mereka berpendapat bahwa inflasi merupakan fenomena moneter. Teori kuantitas menyatakan bahwa bank sentral yang mengawasi suplai uang memiliki kendala tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral mempertahankan suplai uang tetap dalam kondisi yang stabil, maka tingkat harga pun akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan suplai uang dengan cepat, maka tingkat harga akan meningkat dengan cepat (Mankiw, 2000).

Keeratan hubungan inflasi dengan jumlah uang beredar tidak dapat dilihat dalam jangka pendek (Mankiw, 2003). Teori inflasi ini bekerja paling baik dalam jangka panjang, bukan dalam jangka pendek. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan uang dan inflasi dalam data bulanan tidak akan seerat hubungan keduanya jika dilihat selama periode 10-tahun.

### **3. BI Rate**

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan di implementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Penurunan suku bunga BI *Rate* akan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat.

Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI *Rate* untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi (Bank Indonesia).

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia

akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (Sumber: Bank Indonesia). Apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi (Sumber: Bank Indonesia). Fenomena yang terjadi yaitu kenaikan BI Rate ditempuh untuk memastikan inflasi yang meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, agar inflasi dapat segera kembali ke dalam lintasan sarannya.

#### **4. Suku Bunga Kredit Konsumsi**

Bunga adalah biaya yang harus dibayar *borrower* atas pinjaman yang diterima dan imbalan bagi *lender* atas investasinya (Hubbard, 1997). Sementara itu, suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya, maka tingkat suku bunga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (Kern dan Guttman, 1992). Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman (Karl dan Fair, 2001).

Suku bunga menurut adalah harga dari pinjaman (Sunariyah, 2004). Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Suku bunga adalah harga yang dibayarkan untuk satuan mata uang yang dipinjam pada periode waktu tertentu (Lipsey dkk, 1997). Mishkin memandang suku bunga dari sisi peminjam (*borrower*). Suku bunga



adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayar atas penyewaan dana (Mishkin, 2007).

Pengertian bunga (interest) dalam 2 perspektif, yaitu: (1) bunga dari sisi permintaan. Bunga dari sisi permintaan dan sisi penawaran merupakan pendapatan atas pemberian kredit. Bunga merupakan sewa atau harga dari uang, (2) bunga dari sisi penawaran (Siamat, 2005). Pemilik dana akan menggunakan atau mengalokasikan dananya pada jenis investasi yang menjanjikan pembayaran bunga yang lebih tinggi. Suku bunga dapat dibedakan menjadi dua yaitu suku bunga nominal dan suku bunga riil (Lipsey, Ragan, dan Courant, 1997 : 99-100). Dimana suku bunga nominal adalah rasio antara jumlah uang yang dibayarkan kembali dengan jumlah uang yang dipinjam. Sedangkan suku bunga riil lebih menekankan pada rasio daya beli uang yang dibayarkan kembali terhadap daya beli uang yang dipinjam. Suku bunga riil adalah selisih antara suku bunga nominal dengan laju inflasi. Efek ekspektasi inflasi terhadap suku bunga nominal sering disebut efek Fisher dan hubungan antara inflasi dengan suku bunga ditunjukkan dengan persamaan Fisher.

Pengertian kredit menurut Undang – undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan nilainya dapat diukur dengan uang, misalnya bank membiaya kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur),

dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing – masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang ditetapkan bersama.

Penetapan suku bunga kredit dilakukan berdasarkan risk based pricing (RBP). Penetapan bunga kredit atas dasar RBP mempertimbangkan berbagai unsur, diantaranya unsur biaya dana masyarakat, biaya premi resiko, biaya regulasi Giro Wajib Minimum (GWM), dan biaya over head baik untuk penghimpunan dana dan proses kredit, biaya modal dan margin keuntungan bank.

Jenis kredit dilihat dari tujuannya adalah :

- Kredit produktif, yaitu digunakan untuk meningkatkan usaha, produksi atau investasi (digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa)
- Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi
- Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa suku bunga kredit konsumsi adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayar atas penyewaan dana yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Apabila suku bunga kredit konsumsi tinggi, maka masyarakat enggan untuk meminjam dana di bank, sebaliknya apabila suku bunga rendah maka masyarakat akan gemar melakukan peminjaman dana di bank untuk keperluan konsumsi. Dan apabila suku bunga kredit konsumsi tinggi maka akan ikut menurunkan tingkat inflasi.

## 5. Konsumsi

Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini (*current consumption*) sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel saat ini (*current disposable income*). Jika pendapatan disposabel meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan tersebut tidak sebesar pendapatan disposable

$$C = C_o + bY_d$$

- C = Konsumsi
- $C_o$  = Konsumsi *otonomus*
- b = *marginal propensity to consume*
- $Y_d$  = pendapatan *disposable*

Tiga asumsi tentang teori konsumsi (Keynes, 1930). Pertama, dia berasumsi bahwa kecenderungan mengkonsumsi marjinal (*marginal propensity to consume*) yaitu jumlah yang dikonsumsi dari setiap dolar tambahan adalah antara nol dan satu. Asumsi ini menjelaskan pada saat pendapatan seseorang semakin tinggi maka semakin tinggi pula konsumsi dan tabungannya. Teori Keynes kedua adalah rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume*) turun ketika pendapatan naik.

Menurut Keynes, proporsi tabungan orang kaya lebih besar dari pada orang miskin. Jika diurutkan dari orang sangat miskin sampai kaya akan terlihat proporsi tabungan terhadap pendapatan yang semakin meningkat. Terakhir, pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peran penting. Ini berbeda dengan ekonom klasik yang beranggapan semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan mendorong tingkat tabungan dan mengurangi konsumsi.

Konsumsi atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan konsumsi atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Konsumsi atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan konsumsi dari tahun ke tahun.

Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, antara lain :

#### **5.1. Pendapatan Rumah Tangga (*Household Income*)**

Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin baik tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar atau mungkin juga pola hidup menjadi semakin konsumtif, setidaknya semakin menuntut kualitas yang baik.

#### **5.2. Kekayaan Rumah Tangga (*Household Wealth*)**

Tercakup dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah kekayaan riil (rumah, tanah, dan mobil) dan *financial* (deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga). Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi, karena menambah pendapatan disposable.

### **5.3. Tingkat Bunga ( *Interest Rate* )**

Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi (opportunity cost) dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi mereka yang ingin mengonsumsi dengan berutang dahulu, misalnya dengan meminjam dari bank atau menggunakan kartu kredit, biaya bunga semakin mahal, sehingga lebih baik menunda/mengurangi konsumsi.

### **5.4. Perkiraan Tentang Masa Depan (*Household Expectation About The Future*)**

Faktor-faktor internal yang dipergunakan untuk memperkirakan prospek masa depan rumah tangga antara lain pekerjaan, karier dan gaji yang menjanjikan, banyak anggota keluarga yang telah bekerja.

## **6. Inflasi**

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sukirno, Sadono 2004: 27). Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Selanjutnya inflasi di definisikan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen (BPS 2000: 10). Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang

meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan di sisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi barang.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang memperhatikan harga-harga yang harus dibayar konsumen baik di perkotaan maupun pedesaan, (Suharyadi, Purwanto S.K, 2003). IHK mengukur rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat/rumah tangga di suatu daerah (urban) dalam kurun waktu tertentu. Persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bisa bernilai positif atau negatif. Bila persentase perubahan IHK positif dapat dikatakan terjadi inflasi dan sebaliknya jika presentasi ihk negative berarti terjadi deflasi.

Index Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu alat ukur yang tepat untuk mencapai tujuan kebijakan moneter yaitu mengendalikan laju inflasi. Kegiatan

pemerintah dalam bidang ekonomi tampaknya semakin meningkat seiring kemajuan ekonomi. Besar kecilnya kegiatan pemerintah dapat dilihat dari besarnya konsumsi pemerintah dari total output. Stabilitas ekonomi suatu Negara dilihat dari sejauh mana integrasi kebijakan moneter dan fiskal mampu mengurangi laju inflasi (Dornbush dan Fischer, 1996).

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* - COICOP), yaitu :

1. Kelompok Bahan Makanan
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
3. Kelompok Perumahan
4. Kelompok Sandang
5. Kelompok Kesehatan
6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

IHK berfungsi antara lain:

- a. Dapat digunakan sebagai barometer nilai tukar rupiah atau sebagai indikator Inflasi.

- b. Dipakai sebagai landasan untuk memperbaiki/menyesuaikan gaji dan upah karyawan.
- c. Merupakan pengukur perubahan harga konsumen.
- d. Indikator perubahan pengeluaran rumah tangga

## B. Tinjauan Empirik

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencoba mempelajari hasil-hasil penelitian relevan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

**Tabel 1. Tinjauan Empirik**

<b>1.</b>	
<b>Penulis</b>	: David Dickinson dan Jia Liu. 2005
<b>Judul</b>	: The Real Effect Of Monetary Policy In China: An Empirical Analysis
<b>Metode Yang Digunakan</b>	: Empirical analysis menggunakan 6 sistem
<b>Tujuan</b>	: Untuk mengetahui pengaruh perubahan struktural kebijakan moneter terhadap perubahan ekonomi secara riil di China
<b>Hasil Penelitian</b>	: Kebijakan moneter melalui suku bunga kredit memiliki efek terhadap ekonomi riil. Perubahan kebijakan yang diambil berpengaruh pula pada sektor ekonomi riil di Cina



## Lanjutan Tabel 1. Tinjauan Empirik

<b>2.</b>	
<b>Penulis</b>	: Devi Fransiska Sianturi. 2009
<b>Judul</b>	: Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2001.01-2008.09
<b>Metode Yang Digunakan</b>	: <i>Error Correction Model</i>
<b>Tujuan</b>	: Untuk mengetahui seberapa besar peranan kebijakan moneter yaitu suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, suku bunga kredit konsumsi, dan konsumsi sektor swasta serta <i>Gross Domestic Product</i> dalam mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2001.01-2008.09
<b>Hasil Penelitian</b>	: Kebijakan moneter mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengatasi inflasi di Indonesia. GDP dan konsumsi berhubungan positif dengan Inflasi . Suku bunga SBI dan suku bunga kredit konsumsi berhubungan negatif dengan Inflasi. Variabel konsumsi berpengaruh paling besar terhadap inflasi
<b>3.</b>	
<b>Penulis</b>	: Solikin. 2005
<b>Judul</b>	: Fluktuasi Makroekonomi dan Kebijakan Moneter yang (Sub)optimal: Studi Kasus di Indonesia
<b>Metode Yang Digunakan</b>	: Structural Cointegrating Vector Autoregression (VAR)
<b>Tujuan</b>	: Menjawab isu-isu strategis yang terkait dengan penerapan kebijakan moneter yang optimal di Indonesia, terutama yang terkait dengan perumusan kerangka kerja kebijakan moneter yang optimal dikaitkan dengan perumusan respons kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dasar perekonomian Indonesia.
<b>Hasil Penelitian</b>	: Adanya fleksibilitas tertentu dalam jangka pendek (1-2 tahun) mengenai penetapan preferensi kebijakan moneter, pentingnya peranan suku bunga dan langkah <i>pre-emptive</i> berdasarkan keberadaan lag pengaruh kebijakan moneter, pada perekonomian dengan fluktuasi makroekonomi cukup tinggi dibuktikan bahwa respon kebijakan moneter berdasarkan desain <i>State-Contingent Rule</i> cukup superior

## Lanjutan Tabel 1. Tinjauan Empirik

4.	<b>Penulis</b>	: Chichi Shintia Laksani. 2004
	<b>Judul</b>	: Netralitas Uang di Indonesia Melalui Analisis Efektifitas Uang Beredar Dalam Mencapai Tujuan Makroekonomi
	<b>Metode Yang Digunakan:</b>	Structural Cointegrating Vector Autoregression (VAR)
	<b>Tujuan</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui bentuk hubungan kausalitas antara jumlah uang beredar dengan tingkat output</li> <li>2. Mengetahui bentuk hubungan kausalitas antara jumlah uang beredar dengan tingkat harga</li> </ol>
	<b>Hasil Penelitian</b>	: Berdasarkan hasil uji kausalitas diketahui bahwa kebijakan moneter melalui jumlah uang beredar tidak efektif dalam mencapai tujuan makroekonomi. Karna jumlah uang beredar hanya mempengaruhi tingkat harga dan tidak mempengaruhi tingkat output
5.	<b>Penulis</b>	: Sutikno. 2007
	<b>Judul</b>	: Dampak Kebijakan Moneter Terhadap <i>Performance</i> Makro Ekonomi Indonesia (Sebelum Dan Pasca Krisis Ekonomi)
	<b>Metode Yang Digunakan :</b>	Structural Cointegrating Vector Autoregression (VAR)
	<b>Tujuan</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui <i>performance</i> perekonomian makro Indonesia sebelum dan pasca krisis ekonomi.</li> <li>2. Untuk mengetahui apakah instrumen kebijakan moneter yang selama ini dilakukan oleh otoritas moneter memiliki dampak terhadap <i>performance</i> perekonomian Indonesia</li> <li>3. Untuk mengetahui variabel kebijakan berupa agregat moneter ataukah suku bunga yang memiliki hubungan yang lebih erat dengan variabel-variabel makroekonomi Indonesia</li> </ol>
	<b>Hasil Penelitian</b>	: 1. Penurunan dan kenaikan tingkat suku bunga SBI, smooting suku bunga SBI relatif berkontribusi terhadap besaran inflasi dan merupakan cerminan konsistensi dan kredibilitas kebijakan otoritas moneter 2. Lemahnya pengaruh pertumbuhan Jumlah Uang Beredar (M1) terhadap inflasi